



BULETIN APBN

Vol. VIII, Edisi 1, Januari 2023

Peluang dan Tantangan Blue Economy Indonesia

p.3

Partisipasi Publik Dalam Parlemen Saat Pembahasan APBN

p.7

Pendapatan Negara di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

p.11

ISO 9001:2015
Certificate No. IR/QMS/00138



ISSN 2502-8685



Dewan Redaksi

Pengarah

Dr. Inosentius Samsul, S.H.,
M.Hum.

Penanggung Jawab

Drs. Helmizar, M.E.

Pemimpin Redaksi

Robby Alexander Sirait

Redaktur

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo
Dahiri
Martha Carolina

Rastri Paramita

Rosalina Tineke Kusumawardhani
Tio Riyono

Editor

Riza Aditya Syafri

Peluang dan Tantangan Blue Economy Indonesia

p.3

Kontribusi PDB sektor kemaritiman Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan negara lainnya yang rata-rata sudah di atas 30 persen. Blue economy merupakan salah satu peluang untuk memaksimalkan potensi maritim khususnya kelautan Indonesia. Namun terdapat tantangan antara lain terbatasnya pendanaan APBN dalam mendukung blue economy, belum optimalnya WPP dalam pengelolaan perikanan, serta Infrastruktur yang tidak memadai dan jumlah wisatawan yang meningkat menjadi ancaman bagi destinasi wisata laut dan pesisir. Untuk itu pemerintah perlu percepatan realisasi blue financing, memperhatikan langkah teknis kepada WPP serta menanamkan investasi pada infrastruktur pengelolaan sampah dan pembersihan pantai yang efektif biaya.

p.7

Partisipasi Publik Dalam Parlemen Saat Pembahasan APBN

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim kondusif dalam rangka menghasilkan kualitas anggaran negara. Proses anggaran di Indonesia setidaknya dapat terbagi menjadi 6 tahapan. Dari mulai perencanaan penganggaran hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Di Indonesia, DPR RI memberikan ruang masyarakat pada seluruh tahapan proses anggaran. Terdapat beberapa poin percontohan negara Kanada yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Namun untuk mencapai itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, antara lain: 1) Perlu peningkatan Supporting System di Parlemen secara kuantitas; 2) Feedback atas aspirasi yang telah ditampung; 3) Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia masih rendah; 3) Putusan MK membatasi DPR secara teknis membahas hingga satuan tiga.

Pendapatan Negara di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

p.11

Potensi perlambatan ekonomi global sudah mulai terlihat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat serta tren penurunan harga komoditas di awal tahun 2023 ini. Potensi perlambatan ekonomi global secara tidak langsung juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik secara tidak langsung akan memengaruhi ketercapaian pendapatan negara di tahun 2023. Seperti perlambatan perekonomian global di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19, perang dagang, dan geopolitik Rusia-Ukraina memberikan pukulan keras pada pendapatan negara. Namun, di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diprediksikan akan tetap tumbuh sesuai ekspektasi. Hal tersebut tidak berarti menurunkan kewaspadaan pemerintah terhadap dampak-dampak ikutan atas ketidakpastiaan perekonomian global, terutama pada ketercapaian pendapatan negara.

Kritik/Saran

<http://puskajianggaran.dpr.go.id/kontak>



Terbitan ini dapat diunduh di halaman website www.puskajianggaran.dpr.go.id

Peluang dan Tantangan Blue Economy Indonesia

Rosalina Tineke Kusumawardhani^{*)}

Abstrak

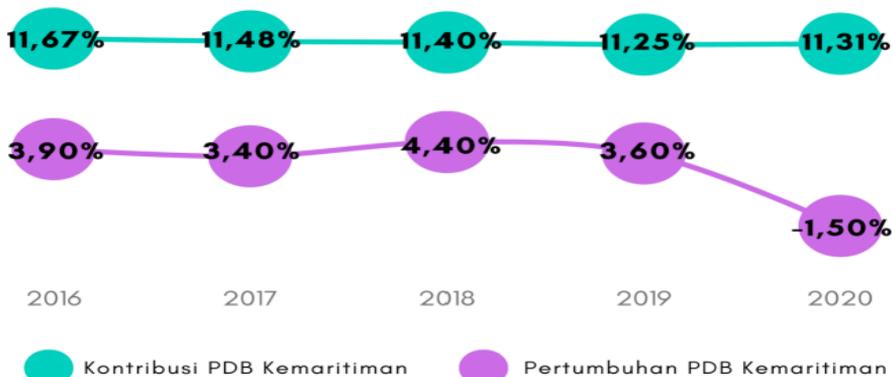
Kontribusi PDB sektor kemaritiman Indonesia masih terbilang rendah dibandingkan negara lainnya yang rata-rata sudah di atas 30 persen. Blue economy merupakan salah satu peluang untuk memaksimalkan potensi maritim khususnya kelautan Indonesia. Namun terdapat tantangan antara lain terbatasnya pendanaan APBN dalam mendukung blue economy, belum optimalnya WPP dalam pengelolaan perikanan, serta Infrastruktur yang tidak memadai dan jumlah wisatawan yang meningkat menjadi ancaman bagi destinasi wisata laut dan pesisir. Untuk itu pemerintah perlu percepatan realisasi blue financing, memperhatikan langkah teknis kepada WPP serta menanamkan investasi pada infrastruktur pengelolaan sampah dan pembersihan pantai yang efektif biaya.

Indonesia memiliki potensi kelautan yang tersebar pada wilayah laut seluas 5,8 juta km persegi yang terdiri dari wilayah teritorial sebesar 3,2 juta km persegi dan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) 2,7 juta km persegi. Selain itu, Indonesia memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan total panjang 81.000 km. Namun, pembangunan ekonomi kelautan Indonesia hingga saat ini belum memberikan kontribusi yang optimal bagi kesejahteraan dan kemajuan nasional. Hal ini dapat terlihat dengan membandingkan rasio luas laut dan panjang pantai terhadap besarnya kontribusi bidang kelautan untuk total Produk Domestik Bruto (PDB) nasionalnya. Luas wilayah laut Indonesia sebesar 62 persen wilayah

Indonesia, tetapi kontribusi ekonomi PDB sektor kemaritiman tahun dari tahun 2016 hingga 2020 berkisar di 11 persen. Sebagai gambaran negara-negara dengan potensi kekayaan laut yang lebih kecil ketimbang Indonesia, seperti Islandia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Tiongkok, kontribusi bidang kelautannya rata-rata sudah di atas 30 persen PDB. Padahal negara-negara tersebut, rata-rata panjang pantai dan luas lautannya relatif lebih kecil dari Indonesia.

Sementara kontribusi bidang kemaritiman di Indonesia terhadap PDB nasional pada tahun 2016 adalah sebesar 11,67 persen, dan cenderung mengalami penurunan hingga tahun 2019 walaupun terjadi peningkatan di tahun 2020 (gambar 1). Hal ini menandakan bahwa kontribusi bidang

Gambar 1. Kontribusi PDB Maritim terhadap PDB Nasional dan Perkembangan PDB Maritim Tahun 2016-2020



Sumber : Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, 2021.

*) Analis APBN ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

kemaritiman memiliki kecenderungan penurunan perlahan terhadap PDB nasional. Selain itu jika melihat dari pertumbuhan PDB kemaritiman dari tahun 2016, cenderung berada di sekitar angka 3 persen hingga 4,4 persen. Walaupun tahun 2020 terjadi penurunan akibat pandemi Covid 19 sebesar -1,5 persen. Namun, melihat kontribusi PDB kemaritiman terhadap nasional pada tahun yang sama berada di angka 11,31 persen, hal ini menandakan bahwa sektor maritim bertahan dalam situasi tersebut. Bila dibandingkan dengan potensinya, sumber daya maritim khususnya sumber daya kelautan masih belum tergarap secara optimal. Jika melihat kebijakan pembangunan nasional selama ini cenderung terlalu berorientasi ke wilayah daratan, sehingga alokasi sumber daya tidak dilakukan secara seimbang dalam mendukung pembangunan antara wilayah darat dan laut.

Salah satu strategi dalam mengoptimalkan nilai tambahekonomisumberdaya kelautan dapat dilakukan melalui konsep *blue economy*. Pengembangan konsep *blue economy* sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Kerangka pembangunan *blue economy* merupakan penjabaran dari amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Indonesia (RPJPN) 2005-2025, khususnya mewujudkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang berdaulat, maju, dan tangguh melalui pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan *blue economy* juga dicantumkan mulai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Indonesia (RPJMN) 2005-2009 hingga RPJMN 2020-2024. Dalam RPJMN 2020-2024 ditekankan pentingnya pengelolaan kelautan dengan baik untuk mencapai agenda pembangunan berkelanjutan. Konsep *blue economy* berupaya mewujudkan keseimbangan antara aspek-aspek yang terkait dalam ekosistem kelautan yaitu ekonomi dan ekologi. Dengan kata lain, *blue economy* tidak hanya melihat potensi kelautan sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga menekankan

kepada pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup di dalam ekosistem kelautan. Selain untuk menjaga kesehatan laut, *blue economy* juga dapat membuka peluang investasi, lapangan pekerjaan, dan pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional. Karena distribusi pertumbuhan ekonomi perikanan cenderung ke wilayah Indonesia bagian timur, sehingga juga meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), potensi *blue economy* diperkirakan mencapai USD 1,33 miliar dan mampu menyerap 45 juta lapangan kerja.

Terbatasnya Pendanaan APBN dalam Mendukung *Blue Economy*

Untuk memenuhi pendanaan tujuh agenda pembangunan yang tertera dalam RPJMN 2020-2024, dibutuhkan pendanaan sebesar USD 1.641,3 miliar. Sedangkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mampu mendanai sekitar 20-25 persen dari kebutuhan tersebut, termasuk kebutuhan sektor kemaritiman, perikanan dan kelautan. Sehingga sulit membebaskan tanggung jawab untuk mengembangkan *blue economy* hanya dengan dana APBN. Pada tahun 2020 sebagai bentuk respon pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah melakukan revisi APBN 2020 untuk menambahkan anggaran sekitar Rp 695 triliun sebagai langkah untuk memberikan bantuan ekonomi. Prioritas utama antara lain meningkatkan perawatan kesehatan, memperluas cakupan perlindungan sosial, dan mendukung sektor bisnis. Karena keterbatasan anggaran ini lah beberapa program *blue economy* yang sudah ada sebelumnya perlu disesuaikan. Anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun 2020 dipotong sebesar 20 persen. Berkaca dari kejadian tersebut, maka dibutuhkan inovasi untuk mendapatkan sumber pendanaan lain yang dapat menunjang pendanaan biru (*blue finance*) untuk menggerakkan pertumbuhan di sektor kelautan dan perikanan.

Pemerintah Indonesia melalui Bappenas mendorong adanya pendanaan inovatif *blue financing* untuk pengembangan pembangunan *blue economy*. Dari sisi inovasi pendanaan, sebenarnya Indonesia telah mengeluarkan instrumen *Green Bond/Sukuk Hijau* yang berhasil mengumpulkan USD3,5 miliar dan Rp5,4 triliun. Selain itu juga pemerintah mengeluarkan *Sustainable Development Goals (SDGs) Bond* yang mencapai EUR500 juta. Namun, jika melihat kebutuhan pendaan tadi, hasil dari pendanaan inovatif tersebut masih belum mencukupi untuk pendanaan pembangunan. Oleh karena itu, untuk memenuhi kekurangan pendanaan tersebut maka saat ini Bappenas berinisiatif mengembangkan *Blue Bond/Sukuk Biru* yang mana nilainya akan melihat dari kebutuhan pembangunan di sektor kelautan ke depan. Sampai saat ini Bappenas telah menyusun kebijakan utama yaitu *Blue Economy Development Framework* dan *SDGs Security Framework* yang kemudian diterjemahkan dalam strategi berbentuk *Blue Finance Policy Note* melalui dukungan World Bank yang diharapkan bisa menjadi salah satu dasar kebijakan *blue financing* di Indonesia. Harapannya *blue financing* dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dari sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Untuk itu, perlunya percepatan realisasi *blue financing* agar dapat digunakan untuk mendukung pendanaan *blue economy*.

Belum Optimalnya WPP dalam Pengelolaan Perikanan

Menyadari adanya tantangan terkait koordinasi lintas batas provinsi, pemerintah meluncurkan sistem Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) pada tahun 2014. Setiap WPP mencakup beberapa pemerintah provinsi, pemangku kepentingan dari sektor industri dan masyarakat. Kelompok-kelompok ini diwakili di oleh Lembaga Pengelola Perikanan (LPP), yang bertanggung jawab untuk memberikan masukan dalam proses pengambilan keputusan di WPP tersebut. Walaupun sistem ini dijadikan

prioritas nasional, LPP belum memiliki anggaran operasional khusus dan seringkali kekurangan SDM, kantor, dan peralatan.

Lebih lanjut, pada tahun 2017 sekitar 38 persen perikanan tangkap laut nasional ditangkap secara berlebihan. Hal ini mengakibatkan penurunan pada pendapatan ekspor, pendapatan pemerintah, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Walaupun pemerintah telah secara efektif mengendalikan akses armada asing ke perairan Indonesia, pengelolaan armada dalam negeri tetap perlu diperkuat. Armada Indonesia terdiri lebih dari 600.000 kapal, lebih dari 90 persen di antaranya adalah kapal kecil (di bawah 10 gros ton) yang berkontribusi terhadap setengah dari total tangkapan (CEA, 2018). Namun fakta di lapangan banyak kapal yang masih belum terdaftar dan tidak terpantau. Bahkan, belum jelas dalam hal koordinasi lintas tingkat pemerintah mengenai pembagian tanggung jawab wilayah perairan. Untuk itu pemerintah perlu memperhatikan langkah teknis kepada WPP dalam pengelolaan perikanan Indonesia agar dapat berjalan optimal.

Infrastruktur yang Tidak Memadai dan Jumlah Wisatawan yang Meningkat Menjadi Ancaman Bagi Destinasi Wisata Laut dan Pesisir.

Dengan keterbatasan infrastruktur dasar dan layanan bagi masyarakat yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, berdampak terhadap destinasi wisata laut dan pesisir utama. Sebagai contoh, di kawasan pariwisata Lombok pada tahun 2015, sebelum ditetapkan sebagai salah satu lokasi prioritas untuk pembangunan pariwisata, hanya 45 persen rumah tangga memiliki akses ke air ledeng, akses sanitasi sebanyak 48 persen, dan layanan pengumpulan sampah sebanyak 26 persen. Tekanan yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup diperparah dengan semakin meningkatnya kebutuhan wisatawan dan sektor bisnis. Hal ini berdampak terhadap persepsi wisatawan yang terlihat dari ulasan *online*

yang diberikan di TripAdvisor, wisatawan mengungkapkan ketidakpuasan mereka mengenai pesisir pantai selatan Lombok, termasuk buruknya sanitasi dan pencemaran di daerah tersebut (Horwath, 2017). Selain itu juga di Taman Nasional Komodo menunjukkan tanda-tanda awal kerusakan lingkungan, yang mana banyaknya wisatawan yang menemukan sampah plastik di laut meningkat dari sekitar 10 persen pada tahun 2009 menjadi lebih dari 50 persen pada tahun 2017 (Harvey et al. 2018).

Guna mengatasi permasalahan sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, layanan dasar dan infrastruktur yang lebih baik dibutuhkan untuk mengelola pencemaran dan timbulan sampah di seluruh Indonesia dengan kebutuhan investasi lebih dari USD5 miliar. Berkaitan dengan itu, investasi tersebut dapat ditargetkan pada kawasan prioritas tinggi untuk mengurangi sampah di laut, seperti kota pesisir dan kota tepi sungai, serta destinasi wisata laut dan pesisir. Dalam jangka pendek, pembersihan pantai dapat dilakukan untuk mengatasi penumpukan sampah plastik, khususnya di kawasan pesisir yang memiliki nilai ekosistem dan pariwisata yang tinggi, serta untuk meningkatkan kesadaran akan masalah tersebut. Pembersihan pantai dapat dilakukan dengan dukungan masyarakat melalui kerja sama dengan sekolah dan kelompok masyarakat. Untuk itu pemerintah perlu menanamkan investasi pada infrastruktur pengelolaan sampah dan pembersihan pantai yang efektif biaya.

Selain itu, strategi pengenaan pajak plastik dan larangan penggunaan plastik dapat diperluas untuk meningkatkan transisi ke produk alternatif atau produk yang dapat digunakan kembali. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat atas proposal Kementerian Keuangan di tahun 2020 untuk memasukkan jenis-jenis plastik tertentu sebagai barang kena cukai akan menjadi langkah yang penting di masa mendatang. Insentif finansial juga dapat diberikan untuk mengurangi sampah plastik dari aktivitas kelautan,

seperti kehilangan atau pembuangan alat tangkap ikan. Program tersebut dapat memanfaatkan pengalaman proyek percontohan di Papua dan Jawa yang memberi insentif finansial bagi nelayan untuk mengumpulkan jaring yang sudah dibuang. Disisi lain pemerintah telah memberikan Dana Insentif Daerah kepada provinsi khusus kategori pengelolaan sampah terbaik dengan Bali dinobatkan sebagai provinsi berkinerja terbaik dalam pengurangan sampah. Untuk itu, pemerintah juga dapat menjadikan Bali sebagai *pilot project* dalam penanganan sampah bagi provinsi lain.

Daftar Pustaka

Bank Dunia (2021). Laut untuk Kesejahteraan: Reformasi untuk Ekonomi Biru di Indonesia. Bank Dunia, Washington, D.C.

CEA(California Environmental Associates) (2018). *Trends in Marine Resources and Fisheries Management in Indonesia: A 2018 Review*. <https://www.packard.org/wp-content/uploads/2018/08/Indonesia-Marine-Full-Report-08.07.2018.pdf>.

Harvey, A., T.N. Sujatmiko, V. Rosady, and R. Johnstonee (2018). *Assessing the Reliability and Utility of Citizen Science Data for Monitoring and Managing Marine Wildlife and Ecosystems. Fifth International Marine Conservation Congress*. Kuching, Malaysia.

Horwath, H.T.L. 2017. *Lombok Baseline Demand and Supply, Market Demand Forecasts, and Investment Needs*. http://bpiw.pu.go.id/uploads/20170302_Lombok_Market_and_Demand_Assessment.pdf.

ICCTF (2022). Pentingnya Pendanaan Biru untuk Pengembangan Pembangunan Ekonomi Biru di Indonesia. Diakses <https://www.icctf.or.id/pentingnya-pendanaan-biru-untuk-pengembangan-pembangunan-ekonomi-biru-di-indonesia/> pada 12 Januari 2023.

Laporan Kinerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. 2021.

Partisipasi Publik Dalam Parlemen Saat Pembahasan APBN

Tio Riyono*)

Abstrak

Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim kondusif dalam rangka menghasilkan kualitas anggaran negara. Proses anggaran di Indonesia setidaknya dapat terbagi menjadi 6 tahapan. Dari mulai perencanaan penganggaran hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban. Di Indonesia, DPR RI memberikan ruang masyarakat pada seluruh tahapan proses anggaran. Terdapat beberapa poin percontohan negara Kanada yang dapat diaplikasikan di Indonesia. Namun untuk mencapai itu, ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, antara lain: 1) Perlu peningkatan Supporting System di Parlemen secara kuantitas; 2) Feedback atas aspirasi yang telah ditampung; 3) Tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia masih rendah; 3) Putusan MK membatasi DPR secara teknis membahas hingga satuan tiga.

Parlemen merupakan representasi publik dalam tata negara di Indonesia. Menurut konstitusi, pada Pasal 69 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa fungsi anggaran yang dimiliki DPR dalam kerangka representasi rakyat. DPR merupakan representasi rakyat sehingga sangat penting untuk terlibat lebih jauh dalam memastikan prioritas anggaran dan prioritas rakyat bertemu (Krafchik et al., 1996).

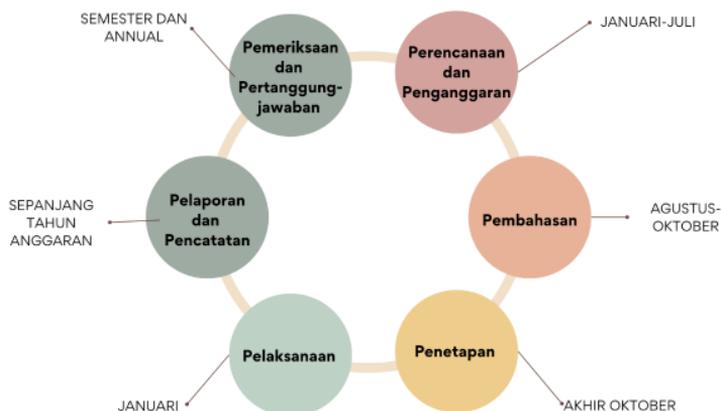
Partisipasi publik merupakan elemen penting dalam menciptakan iklim kondusif dalam rangka menghasilkan kualitas anggaran negara. Salah satu Lembaga terkemuka yaitu Global Initiative For Transparency dan International Budget

Partnership memberikan perhatian pada partisipasi publik (GIFT, 2022). Mereka melakukan *project* pada beberapa negara dalam rangka meningkatkan partisipasi publik. Terdapat lima negara yang tergabung dalam pilot project ini, yaitu Afrika—Benin, Liberia, Nigeria, Senegal, dan Afrika Selatan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keterbukaan dan daya tanggap proses anggaran nasional.

Sekilas Proses Penganggaran Dan Keterlibatan Parlemen

Proses anggaran di Indonesia setidaknya dapat terbagi menjadi 6 tahapan. Dari mulai perencanaan penganggaran hingga pemeriksaan dan pertanggungjawaban.

Gambar 1. Siklus APBN



Sumber: DJPB Kemenkeu, 2023 diolah.

*) Analisis APBN ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

Tahapan Pertama, Perencanaan Dan Penganggaran. Proses penganggaran APBN dimulai dari perencanaan dan penganggaran. Pada proses ini, Pemerintah menyiapkan konsep pokok-pokok kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Selain itu, Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKAKL). Hasil dari proses ini ialah Rancangan Undang - Undang APBN (RUU APBN) dan Nota Keuangan RAPBN yang disampaikan ke DPR untuk dibahas pada tahap selanjutnya.

Tahapan Kedua, Pembahasan APBN. Pada tahap pembahasan ini, Pemerintah bersama DPR melakukan pembahasan RUU APBN dengan mempertimbangkan masukan dari DPD. DPR dapat mengajukan usulan Perubahan dalam RUU APBN. Pada tahapan ini, pengambilan keputusan DPR dibatasi selambat-lambatnya dua bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan. APBN yang disetujui oleh DPR terinci dalam unit organisasi, fungsi, dan program.

Tahapan Ketiga, Penetapan APBN. Pemerintah dan DPR masuk pada tahap penetapan setelah DPR mempelajari Nota Keuangan dan RUU APBN yang disampaikan oleh Presiden. Namun terlebih dahulu masing-masing Fraksi memberikan pandangan umum atas RUU APBN beserta Nota Keuangannya. Pandangan umum disampaikan dalam rapat paripurna pada pekan ke empat Agustus. APBN yang telah ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan rincian pelaksanaan APBN dituangkan lebih lanjut dengan Peraturan Presiden tentang Rincian APBN.

Tahapan Keempat, Pelaksanaan. Setelah ditetapkan maka proses anggaran sudah memasuki tahapan pelaksanaan. Pelaksanaan anggaran diawali dengan disahkannya dokumen pelaksanaan anggaran oleh Menteri Keuangan. Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada menteri/pimpinan lembaga,

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna Anggaran.

Tahapan Kelima, Pelaporan Dan Pencatatan. Semua laporan keuangan tersebut disusun oleh Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal sebagai wujud laporan keuangan pemerintah pusat disampaikan kepada Presiden dalam memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Presiden menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Tahapan Keenam, Pemeriksaan Dan Pertanggungjawaban. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan hasilnya disampaikan oleh Presiden kepada DPR dalam bentuk rancangan undang-undang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN untuk dibahas dan disetujui. DPR atau legislatif dapat melakukan pengawasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengawasan secara langsung dilakukan melalui mekanisme *monitoring* berupa penyampaian laporan semester I kepada DPR selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya semester I tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan tersebut harus pula mencantumkan prognosa untuk semester II dengan maksud agar DPR dapat mengantisipasi kemungkinan ada atau tidaknya APBN Perubahan untuk tahun anggaran yang bersangkutan. Laporan semester I dan prognosa semester II tersebut dibahas dalam rapat kerja antara Panitia Anggaran DPR dan Menteri Keuangan sebagai wakil pemerintah. Pengawasan tidak langsung dilakukan melalui penyampaian hasil pemeriksaan BPK atas pelaksanaan APBN kepada DPR. Pemeriksaan yang dilakukan BPK menyangkut tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan APBN.

Partisipasi Publik Pada Parlemen Dalam Proses Anggaran

DPR RI memberikan ruang masyarakat pada seluruh tahapan proses anggaran. Berdasarkan Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, Pasal 243 menyatakan bahwa masyarakat dapat memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis kepada DPR dalam: a) penyusunan dan penetapan Program legislasi Nasional (Prolegnas); b) penyiapan dan pembahasan rancangan undang-undang; c) pembahasan soal rancangan Undang-Undang mengenai APBN; d) pengawasan pelaksanaan Undang-Undang; dan e) pengawasan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

Studi Kasus di Negara Kanada

Periode anggaran di Kanada ialah April-Maret. *Senate and House of Commons* atau Parlemen Kanada. Proses penganggaran di Kanada sebenarnya sama dengan apa yang ada di Indonesia. Proses anggaran di Kanada pertama dimulai dengan *pre-budget consultation*. Dimana para anggota parlemen melakukan konsultasi publik, atau dengar pendapat dengan pakar dan rakyat. Ketua parlemen Kanada memberikan pengumuman dan mempersilahkan rakyat Kanada berpartisipasi memberikan aspirasi. Per 19 Januari 2023, rakyat Kanada sudah submit sebanyak 706 *brief* untuk ABN TA 2023. Tidak hanya itu, rakyat Kanada juga diberikan pilihan untuk sekedar memberikan komentar dalam bentuk paragraf. Aspirasi mereka ditampung dan diberikan *feedback* melalui *website* <https://www.ourcommons.ca/>.

Kanada selalu membuka aspirasi rakyatnya. Namun secara khusus, tahap *pre-budget consultation* digunakan sebesar-besarnya oleh parlemen untuk melakukan pembahasan dengan Pemerintah. Jika disandingkan dengan Indonesia, *pre-budget* dapat dilakukan parlemen sebelum siklus pembicaraan pendahuluan. Hasilnya kemudian dapat diklusterkan menjadi kategorisasi kebijakan yang akan menjadi bahan anggota terutama Badan Anggaran dalam

pembahasan pembicaraan pendahuluan dengan pemerintah.

Tantangan Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Anggaran Di Indonesia

Terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia, antara lain:

Pertama, perlu peningkatan *Supporting System* di Parlemen. Seperti yang Kanada lakukan bahwa setiap aspirasi rakyat dipastikan terakomodir di dalam *website*. Mereka memiliki sumber daya yang optimal dalam membantu anggota parlemen. Dalam hal ini, artinya DPR atau lebih tepatnya Sekretariat Jenderal DPR RI perlu meningkatkan SDM secara kuantitas. Sebab saat ini mekanisme di DPR di Indonesia sudah terfasilitasi dengan laporan setiap tahun sidang. Hanya saja, laporan ini masih terpisah berdasarkan individu anggota DPR maupun berdasarkan Komisi dan Fraksi.

DPR RI perlu memberikan dukungan peningkatan *supporting system* berkaitan dengan pemetaan aspirasi dari masyarakat. Sehingga, aspirasi masyarakat dapat terkoordinir dengan baik. Kemudian para anggota parlemen khususnya anggota DPR yang duduk di Badan Anggaran dapat menjadikan masukan tersebut sebagai bahan diskusi dengan Pemerintah dalam siklus Pembicaraan Pendahuluan.

Kedua, *feedback* atas aspirasi yang telah ditampung. Kanada melakukan hal ini dengan secara sistematis dan terpadu. Dimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sistem di Kanada memungkinkan rakyat Kanada memberikan input dalam bentuk *brief* atau komentar. Kemudian setelah itu, aspirasi mereka ditanggapi oleh pegawai di parlemen dan atau anggota parlemen melalui kolom komentar. Tidak hanya itu, aspirasi rakyat bisa dipantau melalui *website* yang telah disediakan Kanada.

Hal tersebut secara parsial sebenarnya sudah dilakukan oleh anggota DPR. Apalagi di era media sosial saat ini, para anggota telah dibekali rumah aspirasi

dan menggunakan media sosial. Melalui platform tersebut, anggota bercerita apa saja kegiatan dan apa saja yang menjadi aspirasi serta bagaimana memperjuangkannya. Membangun sistem yang terpadu dan sistematis sebagaimana yang dilakukan Kanada dapat diadopsi Indonesia untuk memudahkan partisipasi masyarakat secara transparan dan akuntabel terutama dalam proses pembahasan anggaran di DPR.

Ketiga, tingkat Pendidikan Masyarakat Indonesia masih rendah. Secara umum, berdasarkan Laporan UNDP (2022) bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia masih jauh tertinggal dengan Kanada. Indonesia menempati urutan ke-115 dengan skor 0,705 sedangkan Kanada menempati urutan ke-15 dengan skor 0,936. Lebih lanjut, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah di Indonesia yaitu 13,7 dan 8,6 sedangkan di Kanada mencapai 16,4 dan 13,8. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat supaya memiliki pemahaman yang sama dan utuh mengenai partisipasi publik. Sehingga masyarakat bisa memahami bagaimana cara memperjuangkan aspirasinya.

Salah satu bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat ialah dengan meningkatkan peran kurikulum pendidikan politik di sekolah-sekolah. Saat ini, materi pendidikan politik dikembangkan dari materi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, budaya demokrasi, dan sistem pemerintahan Indonesia cenderung kurang efektif (Rahman & Suharno, 2020). Sehingga kebijakan ke depan diharapkan dapat mendorong kurikulum pendidikan politik khususnya terkait dengan partisipasi publik.

Keempat, putusan MK membatasi DPR secara teknis membahas hingga satuan tiga. Pada 22 Mei 2014, Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Pasal 159 ayat (5) UU Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (UU MD3) dan Pasal 15 ayat (5) UU Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Amar putusan MK menegaskan frasa “kegiatan, dan jenis belanja” dibatalkan sehingga menjadi “APBN yang disetujui oleh DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, dan program”. Putusan ini bermakna MK membatalkan kewenangan DPR (Badan Anggaran) untuk dapat membahas mata anggaran dalam RAPBN secara teknis bersama pemerintah yang mencakup kegiatan dan jenis biaya (satuan tiga) pada tiap-tiap kementerian atau lembaga pemerintah. DPR tetap mendapatkan informasi APBN tahun berjalan hingga satuan tiga satu bulan setelah APBN disahkan di paripurna. Sehingga partisipasi masyarakat terkait proses anggaran di DPR hanya dapat dilakukan pada pengawasan pelaksanaan keuangan negara oleh kementerian/ Lembaga.

Jika aspirasi masyarakat menyangkut satuan tiga, maka aspirasi tersebut dapat diusulkan dalam Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) sebagaimana amanat UU Nomor 17 Tahun 2014 yang lebih rinci diatur oleh Peraturan DPR Nomor 12 Tahun 2015. Ruang UP2DP dapat menjadi saluran masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya terkait anggaran. Dan sebaiknya mekanisme ini juga dimungkinkan untuk dilakukan secara transparan sehingga masyarakat mampu melakukan pengawasan terhadap aspirasinya.

Daftar Pustaka

DJPB Kemenkeu. (2023). Siklus APBN. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.

GIFT. (2022). FISCAL OPENNESS ACCELERATOR PROJECT. The International Budget Partnership & Global Initiative For Transparency.

Krafchik, W., Wehner, J., & Service, B. I. (1996). THE ROLE OF PARLIAMENT IN THE BUDGET PROCESS.

Undp. (2022). Human Development Report 2021/2022. United National Development Programme.

Pendapatan Negara di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

Iranisa*)
Dahiri**)

Abstrak

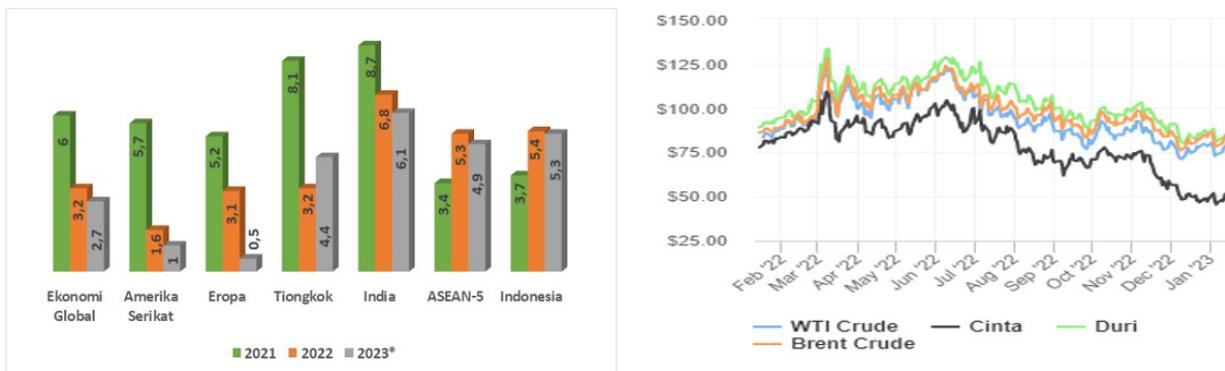
Potensi perlambatan ekonomi global sudah mulai terlihat dari melemahnya pertumbuhan ekonomi di negara-negara Eropa dan Amerika Serikat serta tren penurunan harga komoditas di awal tahun 2023 ini. Potensi perlambatan ekonomi global secara tidak langsung juga akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melambatnya pertumbuhan ekonomi domestik secara tidak langsung akan memengaruhi ketercapaian pendapatan negara di tahun 2023. Seperti perlambatan perekonomian global di tahun 2020 yang disebabkan oleh pandemi covid-19, perang dagang, dan geopolitik Rusia-Ukraina memberikan pukulan keras pada pendapatan negara. Namun, di tengah ketidakpastian pertumbuhan ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2023 diprediksikan akan tetap tumbuh sesuai ekspektasi, Hal tersebut tidak berarti menurunkan kewaspadaan pemerintah terhadap dampak-ikutan atas ketidakpastiaan perekonomian global, terutama pada ketercapaian pendapatan negara.

Berdasarkan *World Economic Outlook* edisi Oktober 2022, IMF memprediksikan pertumbuhan ekonomi global akan mengalami perlambatan hingga 2,7 persen di tahun 2023. Hal ini dikarenakan tekanan inflasi yang tinggi, geopolitik Rusia-Ukraina, dan dampak pandemi Covid-19. Perlambatan pertumbuhan ekonomi global juga dipengaruhi oleh menurunnya perekonomian negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Beberapa harga komoditas global sudah menunjukkan tren penurunan seiring pelemahan aktivitas ekonomi di negara besar. Tensi geopolitik juga masih menjadi salah satu penyebab volatilitas harga komoditas energi dunia. Penurunan

harga komoditas, khususnya energi, berkontribusi terhadap perlambatan tekanan inflasi. Misalnya, minyak mentah Brent yang sudah berada di harga US\$70 per barel di Desember 2022 atau mengalami penurunan signifikan dari US\$126 per barel di bulan September 2022 (Gambar 1).

Pengetatan moneter juga masih berlanjut, terutama di negara maju seperti Amerika Serikat dimana The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan *Fed Funds Rate* (FFR) sebanyak 50 basis poin (bps) menjadi 4,5 persen pada Desember 2022. Pengetatan kebijakan moneter yang dilakukan oleh The Fed secara agresif memperlebar perbedaan suku bunga antara AS dan

Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi dan Tren Harga Minyak Bumi



Sumber : IMF (2022) & Oilprice (2023).

*) Analisis APBN Non-ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

***) Analisis APBN ASN, Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Setjen DPR RI.

negara-negara lain sehingga memicu peningkatan volatilitas di pasar keuangan dan menekan aktivitas ekonomi (LPEM FEB UI, 2022). Tidak berbeda dengan Eropa dan Inggris yang juga menaikkan suku bunga sebagai bentuk pengetatan kebijakan moneter. Potensi perlambatan ekonomi juga diperburuk dengan perlambatan signifikan perekonomian Tiongkok yang masih menerapkan kebijakan *zero-Covid* dan krisis di sektor properti. Kebijakan pengendalian Covid-19 yang dilakukan oleh Tiongkok menyebabkan ketidakpastian sehingga meningkatkan pesimisme terhadap kinerja perekonomian. Kebijakan tersebut juga memberikan ketidakpastian dan disrupsi bagi dunia usaha sehingga berdampak pada terganggunya rantai pasok (BKF, 2022). Adanya potensi perlambatan perekonomian global ini secara tidak langsung akan berdampak pada perekonomian Indonesia yang menjadi salah satu penentu ketercapaian pendapatan negara di tahun 2023.

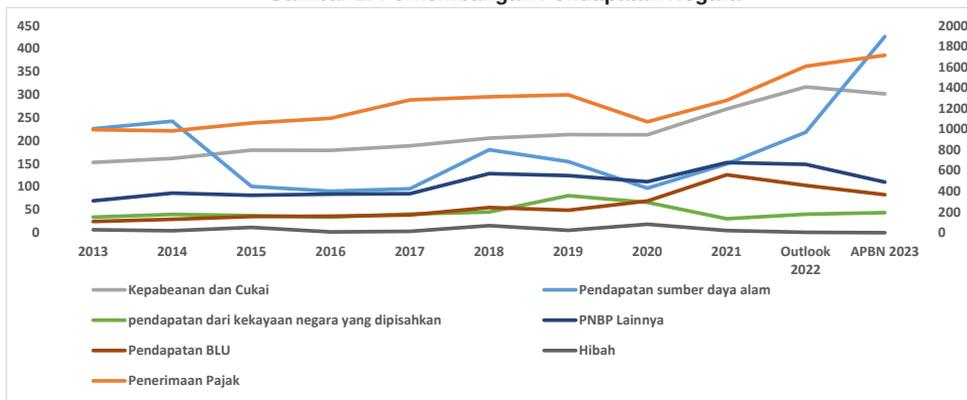
Pendapatan Negara dan Pertumbuhan Ekonomi Berjalan Beriringan

Di tahun 2023, pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp2.443,6 triliun atau tumbuh 0,3 persen dari *outlook 2022*. Penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp2.016,9 triliun, PNBPN sebesar Rp426,3 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp0,4 triliun. Penerimaan perpajakan diharapkan tumbuh 4,8 persen dimana penerimaan pajak mengalami peningkatan 6,7 persen serta kepabeanan dan cukai ditargetkan

lebih rendah dibandingkan tahun 2022. Penurunan kepabeanan dan cukai karena adanya penurunan target pada bea keluar yang ditargetkan hanya sebesar Rp9 triliun atau lebih rendah 81,6 persen dibandingkan dengan *outlook 2022*. Penurunan target ini bisa jadi dikarenakan atas proyeksi harga komoditas terutama CPO yang mulai mengalami stagnasi dan minerba yang diperkirakan akan kembali pada pola normal di level moderat (Kemenkeu, 2022).

PNBP juga ditargetkan lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2022, namun terdapat peningkatan 95,1 persen pada pendapatan SDA dari Rp218,5 triliun menjadi Rp426,3 triliun di tahun 2023. Kontraksi pada PNBPN terjadi pada PNBPN lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU). Penurunan yang terjadi pada PNBPN Lainnya dikarenakan adanya kontraksi atas penerimaan PNBPN K/L sebagai akibat penurunan PNBPN non layanan yang bersifat insidental seperti Premium Obligasi Negara, Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu, dan penempatan di Bank Indonesia dan Bank Umum. Pendapatan BLU juga ditargetkan lebih rendah dibandingkan dengan *outlook 2022* yang disebabkan adanya perubahan besaran tarif harga *threshold* tertinggi yang ditetapkan melalui peraturan Menteri Keuangan dan tren pendapatan BLU kelapa sawit yang menurun atas perkiraan harga CPO yang melandai di tahun 2023. Bahkan pendapatan BLU ini sudah mulai mengalami penurunan sejak tahun 2021.

Gambar 2. Perkembangan Pendapatan Negara



Sumber : Kementerian Keuangan, 2022.

Salah satu tantangan dalam memenuhi capaian target pendapatan negara di tahun 2023 ialah adanya potensi pelemahan ekonomi global. Contohnya saja, perlambatan ekonomi global yang dihadapi pada tahun 2019 dan 2020 memberikan dampak pada pendapatan negara yang berkontraksi cukup dalam yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Tahun 2019, penerimaan pajak hanya mampu tumbuh 1,5 persen dan penerimaan pajak juga mengalami tekanan yang cukup kuat atau berkontraksi 19,6 persen yang dipengaruhi oleh kontraksi sebagian besar jenis pajak penyumbang utama pendapatan negara seperti PPh Badan, PPN dalam Negeri, dan pajak-pajak yang terkait dengan impor sebagai dampak dari penurunan harga komoditas yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Bahkan di tahun 2020, penerimaan pajak mengalami tekanan yang cukup dalam hingga 19,6 persen. Menurunnya permintaan dan pembatasan aktivitas sosial ekonomi menjadi salah satu faktor utama tidak tercapainya pendapatan negara. Rendahnya harga komoditas utama dunia terutama harga minyak bumi dan batubara akibat dari perlambatan perekonomian juga merupakan salah satu penyebab tidak tercapainya pendapatan negara. Hal tersebut juga menyebabkan pendapatan SDA migas mengalami kontraksi cukup dalam, hingga 43 persen yang disebabkan oleh ICP yang turun hingga US\$40,4 per barel di tahun 2020.

Sebaliknya, kinerja pendapatan negara di tahun 2021 sudah mulai bangkit seiring dengan pemulihan ekonomi dan membaiknya perekonomian global. Di tahun 2022 terlihat pendapatan negara sudah positif dimana pertumbuhan ekonomi mampu tumbuh di angka 5,4 persen dibandingkan dengan tahun 2020 yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga 2,1 persen. Membaiknya kinerja pendapatan tersebut dipengaruhi oleh membaiknya perekonomian nasional, dampak peningkatan harga komoditas, serta kebijakan reformasi

perpajakan. Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di tahun 2022 tidak hanya dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas, terutama minyak bumi dan mineral, tapi juga didorong adanya peningkatan pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang berasal dari setoran dividen sebagai akibat membaiknya kinerja BUMN. Hingga akhir November 2022, realisasi pendapatan negara telah mencapai Rp2.377,5 triliun atau 109,4 persen dari target. Kinerja penerimaan perpajakan yang bersumber dari PPh memiliki realisasi tertinggi yaitu sebesar 113,7 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa di tahun 2022 tergambar adanya pemulihan ekonomi di dunia usaha yang terlihat dari profit yang dihasilkan. Tidak hanya dari PPh, jenis penerimaan perpajakan lainnya juga menunjukkan hasil yang positif. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2022 dan harga komoditas yang relatif masih tinggi juga menjadi salah satu pendorong kinerja PNBP yang semakin baik dimana hingga akhir November 2022 telah mencapai Rp527,25 triliun atau 109,5 persen dari target dan mampu tumbuh 37,83 persen (yoy).

Terlihat bahwa ketika pertumbuhan ekonomi mengalami penguatan, maka secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja pendapatan negara. Misalnya saja pendapatan negara di tahun 2020 dan pendapatan negara di tahun 2022 mengalami kinerja yang jauh berbeda. Tahun 2020, pendapatan negara mengalami kontraksi yang cukup dalam ketika terjadi perlambatan perekonomian global dan domestik, terutama untuk pendapatan SDA. Sebaliknya, pendapatan negara mengalami perbaikan kinerja ketika pertumbuhan ekonomi membaik, baik global maupun domestik. Di sisi lain, tantangan fluktuasi harga komoditas masih menjadi hal yang sulit di kendalikan oleh pemerintah sehingga ketercapaian pendapatan negara yang berhubungan dengan komoditas akan sangat bergantung pada kestabilan harga komoditas. Perbaikan tata kelola dan pengawasan secara berkelanjutan

di perlukan untuk dapat meminimalisir potensi-potensi ketidaktercapaian pendapatan negara.

Tetap Waspada di Tengah Ketidakpastian Perekonomian Global

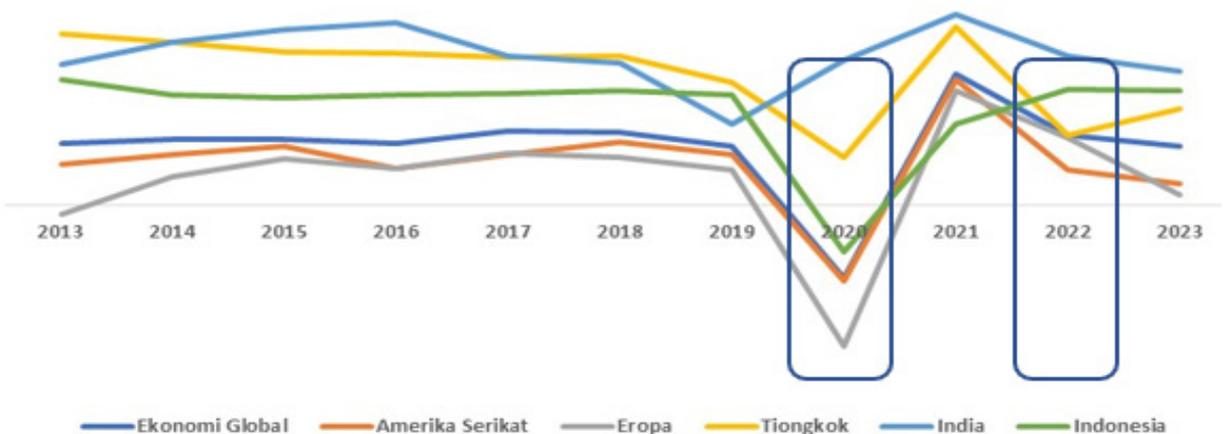
Di tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh di atas ekspektasi. Bahkan, beberapa institusi internasional menyebutkan di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi Indonesia masih akan tumbuh dengan optimis walaupun di tengah potensi perlambatan ekonomi global (Gambar 3). Laju inflasi inti yang diperkirakan masih akan terus tumbuh seiring dengan aktivitas domestik yang semakin membaik menjadi salah satu faktor pendukung pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 (Kemenkeu, 2022). Kuatnya perekonomian dalam negeri memberikan keuntungan bagi perekonomian Indonesia sehingga tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi ketidakpastian perekonomian global. Pada saat perekonomian tumbuh dan menguat, maka akan memberikan dampak terhadap membaiknya faktor-faktor produksi. Misalnya saja, perusahaan-perusahaan dapat beroperasi secara optimal yang mana pada akhirnya akan memberikan dampak pada penerimaan pajak.

Sebaliknya, ketika perekonomian melambat dan terjadi pelemahan, maka masyarakat dan industri akan mengurangi dan menahan pengeluaran mereka yang

pada akhirnya juga akan memberikan dampak kepada pendapatan negara.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksikan akan mampu tumbuh di atas 5,2 persen di tahun 2023 (Kemenkeu, 2022). Hal ini menunjukkan optimisme perekonomian Indonesia di tahun 2023 tanpa mengabaikan adanya potensi perlambatan perekonomian global. Membaiknya pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak positif terhadap ketercapaian pendapatan negara. Pemerintah juga harus menjaga stabilitas keamanan dan politik di tahun menjelang Pemilihan Umum. Kebijakan fiskal di tahun 2023 juga menjadi penentu ketercapaian pendapatan negara. Kebijakan pendapatan negara dengan megoptimisasi penerimaan negara melalui konsolidasi fiskal yang berkualitas dan kesinambungan fiskal dengan tetap menjaga iklim investasi dan daya saing usaha sebaiknya mendukung pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, pemerintah tidak boleh mengabaikan risiko atas potensi perlambatan perekonomian global. Pemerintah di tahun 2023 sebaiknya terus mewaspada faktor risiko pelemahan perekonomian global yang akan memengaruhi pendapatan, seperti yang terjadi di tahun 2020 dimana pendapatan negara berkontraksi cukup dalam akibat pandemi Covid-19 dan adanya perlambatan ekonomi di hampir semua negara.

Gambar 3. Tren Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : Kementerian Keuangan, 2022.

Daftar Pustaka

BKF. 2022. Tinjauan Ekonomi, Keuangan, & Fiskal: Melaju di Tengah Turbulensi Ekonomi Global. Jakarta. Desember

International Monetary Fund. 2022. World Economic Outlook: Countering the Cost-of-Living Crisis. Washington, DC. October

Kementerian Keuangan. 2022. Nota Keuangan beserta RAPBN Tahun Anggaran 2023.

LPEM FEB UI. 2022. Indonesia Economic Outlook 2023: Tumbuh di tengah Perlambatan Global. Jakarta. November.

Oilprice. 2023. Oil Price Charts di akses pada <https://oilprice.com/oil-price-charts/> tanggal 13 Januari 2023.

The World Bank. 2022. Indonesia Economic Prospect: Trade for Growth and Economic Transformation. DC. December.



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI

www.puskajianggaran.dpr.go.id

Telp. 021-5715635 Fax. 021-5715635

Instagram: @puskajianggaran

Twitter: @puskajianggaran

Youtube: Pusat Kajian Anggaran DPR RI

